

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) pada Triwulan I tahun 2025 di Kabupaten Aceh Besar mengalami fluktuasi yang signifikan, keadaan ini pada umumnya cenderung menurun, seperti halnya yang digambarkan dalam tabel di bawah ini.

TABEL INDEK PERUBAHAN HARGA (IPH) KABUPATEN ACEH BESAR

TRIWULAN I TAHUN 2025

Tabel 1. Perubahan IPH Triwulan I

No	Bulan	Minggu ke-	Perubahan IPH (%)
1	Januari	1	4.20
2	Januari	2	3.59
3	Januari	3	3.72
4	Januari	4	4.08
5	Februari	1	0.63
6	Februari	2	-0.57
7	Februari	3	-1.11
8	Februari	4	-0.95
9	Maret	1	0.11
10	Maret	2	-0.72
11	Maret	3	-1.18
		Total	11.8
		Rata-rata	1.07

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Besar pada tabel diatas selama periode Januari hingga Maret 2025, perkembangan Indeks Perubahan Harga (IPH) menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali.

Pada bulan Januari 2025, IPH Kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan konsisten di seluruh minggu pengamatan. Perubahan IPH tercatat sebesar 4,20 persen pada minggu pertama, 3,59 persen pada minggu kedua, 3,72 persen pada minggu ketiga, dan 4,08 persen pada minggu keempat. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan kenaikan harga yang cukup kuat pada awal tahun, yang diduga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat serta faktor musiman pasca libur akhir tahun.

Memasuki bulan Februari 2025, perkembangan IPH menunjukkan tren perlambatan. Pada minggu pertama masih tercatat kenaikan sebesar 0,63 persen, namun pada minggu kedua hingga minggu keempat terjadi penurunan masing-masing sebesar -0,57 persen, -1,11 persen, dan -0,95 persen. Penurunan ini mengindikasikan mulai terjadinya koreksi harga (deflasi), yang mencerminkan membaiknya pasokan komoditas serta efektivitas langkah stabilisasi harga yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama TPID.

Selanjutnya, pada bulan Maret 2025, IPH kembali menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan melemah. Pada minggu pertama tercatat kenaikan tipis sebesar 0,11 persen, namun pada minggu kedua dan ketiga mengalami penurunan masing-masing sebesar -0,72 persen dan -1,18 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan inflasi relatif mereda, meskipun masih diperlukan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga pada komoditas tertentu.

Secara kumulatif, total perubahan IPH selama 11 minggu pengamatan tercatat sebesar sekitar 11,8 persen dengan rata-rata perubahan mingguan sebesar 1,07 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada awal tahun dapat diimbangi oleh penurunan harga pada periode berikutnya, sehingga stabilitas harga di Kabupaten Aceh Besar secara umum tetap terjaga.

TPID Kabupaten Aceh Besar akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Ke depan, fokus pengendalian inflasi akan diarahkan pada penguatan cadangan pangan daerah, optimalisasi operasi pasar, serta pemantauan intensif terhadap komoditas strategis guna mengantisipasi potensi tekanan inflasi musiman.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Di lihat dari perkembangan IPH triwulan I di Kabupaten Aceh Besar yaitu terjadi lonjakan harga musiman di awal tahun, fluktuasi harga antar periode, serta deflasi berulang pada bulan berikutnya yang menunjukkan bahwa system stabilisasi harga masih memerlukan penguatan dari sisi pasokan, distribusi dan koordinasi kebijakan. Lonjakan inflasi di awal tahun ini disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Peningkatan permintaan pasca libur akhir tahun
2. Keterbatasan pasokan sementara pada komoditas strategis
3. Distribusi belum optimal
4. Tidak seimbangnya pasokan dan permintaan
5. Minimnya buffer stock
6. Respon kebijakan belum seragam antar sektor
7. Penurunan permintaan

Pasokan melimpah pada beberapa komoditas

- 8.
 9. Lemahnya serapan pasar
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, S.STP., MM didampingi Kadis Pertanian Aceh Besar Jakfar, SP melakukan penanaman padi di areal persawahan dengan luas 95 Hektar menggunakan rice transplanter di Gampong Bueng Kecamatan Kota Jantho.
- Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP., MM melakukan peninjauan di Pasar Induk Lambaro untuk memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan di awal tahun 2025 sekaligus menjelang Bulan Ramadhan.
- Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, S.STP., MM bersama Kadis Pertanian Jakfar, SP., M.Si., Plt Kadis Kopukmdag Trizna Darma, ST., Plt. Kadis Perhubungan Dodi Trisna, S.STP., M.Si dan Camat Sukamakmur Azhari, SH., M.Si melakukan pemantauan penyemprotan desinfektan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan PMK terhadap hewan ternak yang masuk ke pasar di Sibreh yang merupakan pasar hewan terbesar di Aceh yang menampung hewan ternak dari berbagai daerah di Aceh.
- Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar melakukan pengecekan dan pembersihan pada saluran irigasi di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Montasik dan Kecamatan Blang Bintang.
- Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris diwakili oleh Plt. Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos.,M.Si menghadiri panen raya jagung serentak tahap 1 secara virtual di seluruh Indonesia yang berlangsung di Gampong Alue Rindang, Kecamatan Seulimeum.
- Bupati Aceh Besar H. Syech Muharram Idris diwakili oleh Plt. Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si bersama unsur Forkopimda dan Kepala OPD terkait melakukan peninjauan Pasar Seulimeum menjelang bulan Ramadhan tahun 1446 Hijriah.
- Bupati Aceh Besar H. Syech Muharram Idris diwakili oleh Plt. Sekda Aceh Besar Bahrul Jamil, S.Sos., M.Si bersama Kapolres Aceh Besar yang diwakili Kabag Ren Kopol Junaidi, SH, Dandim 0101/KBA yang diwakili oleh Danramil Seulimeum Mayor

Juliwandri, Kajari yang diwakili Kasi Intel Filman Ramadhan, SH., MH, Kepala BPS Aceh Besar Rusmadi, SE dan ikut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si, Kadis Pertanian Jakfar, SP., M.Si, Kadis Pangan Alyadi, S.Pi, MM, Kadis Satpol PP & WH Muhajir, S.STP., M.PA., Plt. Kadis Kopukmdag Trizna Darma, ST., Plt. Kadis Perhubungan Dodi Trisna, S.STP., M.Si., Kabag Perekonomian & SDA Darwan Asrizal, SE., MT dan Kabag Prokopim Imam Munandar, S.TP melakukan pengawasan Gas LPG 3 Kg di SPPBE Lampanah Kecamatan Indrapuri.

- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian Aceh Besar melakukan salah satu program unggulan yaitu penggemukan sapi dalam rangka untuk meningkatkan ketersediaan daging melalui pembinaan yang insentif dan mendorong peternak agar beralih dari system tradisional ke metode yang lebih modern guna meningkatkan produktifitas dan kualitas hasil ternak di Kabupaten Aceh Besar.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Pertanian Aceh Besar siap mengembangkan budidaya kacang koro. Kepala Dinas Pertanian Jakfar, SP., M.Si melalui Kabid Penyuluhan Pertanian Aceh Besar Rita Aulia, SP., M.Si memberikan arahan pada pelatihan pertanian regeneratif dan budidaya kacang koro yang diselenggarakan oleh Rumoh Pangan Aceh di Gampong Angan Kecamatan Darussalam. Kacang Koro menjadi alternatif menggantikan kacang kedelai impor sebagai bahan baku pembuatan tempe di Aceh dan juga untuk meningkatkan ketahanan pangan di Aceh Besar.
- Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil Bersama jajaran TNI AU melaksanakan panen padi di lahan ketahanan pangan milik Lanud Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang dalam rangka upaya mendukung program ketahanan pangan di Aceh Besar sejalan dengan himbauan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.
- Bupati Aceh Besar Syech Muharram Idris diwakili oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan Setdakab Aceh Besar M. Ali, S.Sos., M.Si menyerahkan paket sembako pada Gerakan Pangan Murah kepada masyarakat kurang mampu secara simbolis di halaman Meunasah Gampong Lam Hasan Kecamatan Peukan Bada yang digelar oleh Dinas Pangan Aceh Besar, Dinas Pangan Aceh serta Perum Bulog Kanwil Aceh.
- Dinas Pertanian Aceh Besar melalui Kabid Penyuluh Pertanian Aceh Besar Rita Aulia, SP., M.Si mendampingi Koordinator Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Rahmad Kurniadi, SP berserta Tim Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Ingin Jaya melakukan panen padi di Gampong Lubok Sukon Kecamatan Ingin Jaya.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.**

1. Melakukan gerakan menanam di pekarangan rumah maupun pemanfaatan lahan kosong secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat ketersediaan pangan rumah tangga dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang perlu dievaluasi efektivitasnya melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis.
2. Kalau ada Indikasi ketidakseimbangan antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) perlu didukung oleh ketersediaan data neraca pangan yang akurat dan diperbarui secara berkala, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dirumuskan secara tepat sasaran serta dievaluasi berdasarkan perkembangan stok dan harga.
3. Menambah dan memperluas jaringan alternatif dengan daerah pemasok bahan pangan yang terjangkau guna meningkatkan efisiensi distribusi dan menekan biaya logistik, yang selanjutnya perlu dievaluasi melalui penurunan disparitas harga dan kelancaran pasokan antarwilayah.
4. Mendorong peningkatan kemampuan manajemen usaha, baik dalam pengelolaan barang maupun keuangan, khususnya bagi pelaku usaha pangan, sebagai bagian dari penguatan rantai pasok, serta dievaluasi melalui peningkatan kapasitas usaha dan stabilitas harga di tingkat produsen maupun konsumen.
5. Memperkuat kerja sama antar daerah kabupaten serta meningkatkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah, yang perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas koordinasi, realisasi program, dan dampaknya terhadap stabilitas harga.
6. Kebijakan penguatan pasokan melalui koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha telah mampu mendorong terjadinya koreksi harga pada Februari-Maret. Namun, lonjakan harga yang cukup tinggi pada Januari menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan strategis belum sepenuhnya siap menghadapi peningkatan permintaan musiman. Indikasi adanya ketidakseimbangan supply dan demand harus didukung oleh ketersediaan data neraca pangan secara
7. Pelaksanaan operasi pasar dan pemantauan harga berkontribusi terhadap penurunan tekanan inflasi setelah Januari. Meskipun demikian, masih terdapat volatilitas harga antar minggu.
8. Tidak terdapat indikasi gangguan distribusi besar pada Februari-Maret, yang tercermin dari turunnya harga. Namun, tingginya kenaikan di awal tahun mengindikasikan bahwa distribusi pada periode puncak permintaan masih menghadapi tantangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Adapun Rekomendasi pengendalian dari yang diterangkan diatas antara lain dapat berupa :

1. Melakukan pemantauan pasokan komoditas secara berkala dan memastikan validitas data surplus-defisit komoditas penting.
2. Terus meningkatkan produksi komoditas pangan (Kemandirian Pangan) dengan memanfaatkan lahan kosong/terlantar dan produksi pangan secara mandiri oleh
3. Melaporkan Laporan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) secara harian kepada Inspektur di Daerah dalam rangka penanganan inflasi di Daerah.
4. Melakukan 6 Upaya Konkrit dalam Penanganan Inflasi di Daerah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan Nomor 143/ PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam penanganan Dampak inflasi di daerah, yaitu:
 1. Melakukan operasi pasar murah;
 2. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
 3. Kerjasama dengan Daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
 4. Melakukan Gerakan Menanam;
 5. Merealisasikan Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Dan Belanja Wajib Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Besar;
 6. Dukungan Transportasi dari APBD.